

**TATA KELOLA PEMERINTAHAN DALAM MENGATASI  
KEMACETAN MELALUI PENYEDIAAN TRANSPORTASI PUBLIK  
(Studi Pada Pengelolaan Trans Metro Bandung Oleh Dinas Perhubungan Kota  
Bandung Tahun 2020)**

<sup>1</sup>Lula Aulia Nabilah

<sup>2</sup>Antik Bintari

<sup>3</sup>Ivan Dharmawan

<sup>1</sup>Universitas Padjadjaran

<sup>2</sup>Universitas Padjadjaran

<sup>3</sup>Universitas Padjadjaran

Email Korespondensi : [lulaaulianabilah478@gmail.com](mailto:lulaaulianabilah478@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This research is motivated by the problem of congestion in Bandung City, where one of the main causes of congestion in Bandung City is an increase in the volume of vehicles on the road that cannot be accommodated by road capacity. Therefore, the government of Bandung City made an effort to overcome congestion by providing the public transportation., one of them is the Trans Metro Bandung which is managed by Dinas Perhubungan of Bandung City. However, judging from the problems in the aspect of providing public transportation that is Trans Metro Bandung, its considered still far from the expected conditions in terms of management and quality of service to the community, so that the people of Bandung City have not made Trans Metro Bandung an alternative to driving. This article aims to describe how good governance is in overcoming congestion through the provision of public transportation, in this case a study on management of the Trans Metro Bandung which managed by Dinas Perhubungan of Bandung City in 2020. This research was conducted using a descriptive method with a qualitative approach. From the results of the study, its known that the Dinas Perhubungan of Bandung City has not been fully optimal in creating good governance in the transportation sector because it has not fulfilled all aspects of governance that is accountability, transparency, openness, and the legal framework. Especially on the principle of transparency, where there is still a lack of clarity between the objectives and the reality that occurs in the field related to the provision public transportation to overcome congestion.*

**Keywords : Governance, Congestions, Public Transportation, Trans Metro Bandung**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan kemacetan yang ada di Kota Bandung, dimana salah satu penyebab utama kemacetan di Kota Bandung adalah adanya peningkatan volume kendaraan di jalan yang tidak dapat ditampung oleh kapasitas jalan. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung melakukan salah satu upaya untuk mengatasi kemacetan dengan menyediakan transportasi publik, salah satunya adalah bus Trans Metro Bandung yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung. Namun, dilihat dari permasalahan dalam aspek penyediaan transportasi publik yaitu Trans Metro Bandung dinilai masih jauh dari kondisi yang diharapkan dari segi pengelolaan dan kualitas pelayanannya pada masyarakat

sehingga masyarakat Kota Bandung belum menjadikan Trans Metro Bandung sebagai alternatif untuk berkendara. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana tata kelola pemerintahan dalam mengatasi kemacetan melalui penyediaan transportasi publik, dalam hal ini studi pada pengelolaan Trans Metro Bandung oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2020. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Dishub Kota Bandung belum sepenuhnya optimal dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dalam bidang transportasi karena belum memenuhi semua aspek tata kelola pemerintahan yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan kerangka hukum. Terutama pada prinsip transparansi, dimana masih ada ketidakjelasan antara tujuan dan realita yang terjadi di lapangan terkait penyediaan transportasi publik untuk mengatasi kemacetan.

**Kata kunci : Tata Kelola Pemerintahan, Kemacetan, Transportasi Publik, Trans Metro Bandung**

**PENDAHULUAN**

Kota Bandung merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat yang memiliki jumlah kepadatan penduduk yang tinggi. Kota Bandung memiliki aktifitas kota yang cukup besar karena Kota Bandung ini menjadi pusat kota yang strategis dalam hal perdagangan, bisnis, pendidikan, dan pariwisata. Tingginya kepadatan penduduk di Kota Bandung ini menimbulkan berbagai permasalahan penduduk, salah satunya adalah kemacetan lalu lintas. Kepadatan penduduk di Kota Bandung akan berpengaruh terhadap peningkatan aktifitas masyarakat. Hal ini menyebabkan meningkatkan permintaan masyarakat terhadap sarana transportasi dan meningkatkan penggunaan arus lalu lintas sehingga menimbulkan kemacetan di Kota Bandung. Berdasarkan survey dari *Asian Development Bank*, Kota Bandung berada pada peringkat 14 di Kawasan Asia sebagai salah satu kota termacet di Asia. Peringkat Kota Bandung sebagai kota termacet berada diatas Kota Jakarta dan Surabaya.

Selain itu, salah satu penyebab utama kemacetan di Kota Bandung adalah adanya peningkatan volume kendaraan di jalan yang tidak dapat ditampung oleh kapasitas jalan. Menurut data dari Dinas Perhubungan Kota

Bandung, peningkatan jumlah pertumbuhan kendaraan di Kota Bandung bisa mencapai 11 persen setiap tahunnya dengan didominasi oleh kendaraan pribadi sebanyak 98 persen dan kendaraan umum sebanyak 2 persen. Berikut data potensi kendaraan di Kota Bandung tahun 2020 sebagai berikut :

**Tabel 1.3** Potensi Kendaraan di Kota Bandung, 2020

Jenis Kendaraan Vehicle Type (1)	Kota Bandung I Pajajaran (2)	Kota Bandung II Kawalyaan (3)	Kota Bandung III Soekarno Hatta (4)	Total Kendaraan Bermotor (5)
<b>Sedan, Jeep, Minibus</b>				
Pribadi	114 461	129 094	115 886	359 441
Dinas	503	3 393	2 517	6 413
Umum	1 078	2 517	1 174	4 769
<b>Bus, Microbus</b>				
Pribadi	757	1 019	384	2 160
Dinas	68	359	21	448
Umum	1 008	1 273	968	3 249
<b>Truck, Pick up</b>				
Pribadi	25 457	19 015	15 933	60 405
Dinas	97	1 386	845	2 328
Umum	2 603	845	1 047	4 495
<b>Alat Berat</b>				
Pribadi	0	3	0	3
Dinas	0	4	0	4
Umum	0	0	0	0
<b>Sepeda Motor, Scooter</b>				
Pribadi	414 343	378 330	324 106	1 116 779
Dinas	672	10 052	576	11 300
Umum	0	1	0	1
<b>Total</b>				
Pribadi	555 018	527 461	456 309	1 538 788
Dinas	1 340	15 194	3 959	20 493
Umum	4 689	4 636	3 189	12 514
<b>Jumlah/Total</b>	<b>561 047</b>	<b>547 291</b>	<b>463 457</b>	<b>1 571 795</b>

**Sumber :** Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

Di tabel 1.3 dapat dilihat bahwa total kendaraan di Kota Bandung mencapai 1.571.795 kendaraan. Total kendaraan pribadi

di Kota Bandung mencapai 1.538.788 kendaraan. Sedangkan total kendaraan umum di Kota Bandung mencapai 12.514 kendaraan. Hal ini menunjukkan bahwa kendaraan pribadi di Kota Bandung memiliki jumlah yang tinggi dibandingkan dengan transportasi umum. Penggunaan kendaraan pribadi oleh masyarakat Kota Bandung maupun perantau dari luar Kota Bandung menjadi salah satu faktor penyebab kemacetan yang cukup besar di Kota Bandung. Beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi diantaranya faktor waktu, keamanan, dan kenyamanan.

Salah satu upaya Pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi kemacetan adalah dengan menyediakan transportasi publik, salah satunya adalah bus Trans Metro Bandung yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung. Dinas Perhubungan Kota Bandung sebagai salah satu instansi dari Pemerintah Daerah Kota Bandung memiliki peranan penting dalam upaya mengatasi permasalahan kemacetan di Kota Bandung. Hal ini sesuai dengan salah satu program yang tertuang dalam rencana strategis dari Dinas Perhubungan Kota Bandung yaitu menciptakan kondisi lalu lintas di Kota Bandung menjadi aman, nyaman, tertib, dan terkendali. Penyediaan Trans Metro Bandung sebagai transportasi publik ini diharapkan dapat mendorong masyarakat Kota Bandung yang menggunakan kendaraan pribadi dapat beralih menggunakan kendaraan umum sebagai penunjang mobilitas sehari-hari sehingga mampu meminimalisir kemacetan lalu lintas di Kota Bandung. Salah satu visi diadakannya program Trans Metro Bandung ini adalah untuk memberikan pelayanan transportasi publik yang aman, nyaman, handal, dan manusiawi.

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Bandung dengan penyediaan Trans Metro Bandung sebagai transportasi publik pun dinilai hanya menjadi solusi sementara dan belum menjadi solusi yang terbaik dalam mengatasi kemacetan di Kota Bandung karena dilihat dari permasalahan dalam aspek penyediaan transportasi publik yaitu Trans Metro Bandung dinilai masih jauh dari kondisi yang diharapkan dari segi pengelolaan dan kualitas pelayanannya pada masyarakat sehingga masyarakat Kota Bandung belum menjadikan Trans Metro Bandung sebagai alternatif untuk berkendara. Untuk melakukan pengoptimalan dalam pengelolaan dan pelayanan transportasi publik, pemerintah Kota Bandung dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Bandung perlu melakukan tata kelola pemerintahan yang baik dalam hal ini mengatasi kemacetan melalui penyediaan transportasi publik yaitu bus Trans Metro Bandung terutama pada tahun 2020 ketika ada pandemi Covid-19. Banyaknya jumlah kendaraan pribadi sebagai penyebab dari kemacetan dapat ditekan apabila pemerintah daerah melakukan suatu langkah yang efektif untuk mengelola transportasi publik dalam hal ini bus Trans Metro Bandung.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana tata kelola pemerintahan dalam mengatasi kemacetan melalui penyediaan transportasi publik, dalam hal ini studi pada pengelolaan Trans Metro Bandung oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2020 sesuai dengan teori yang digunakan yaitu teori tata kelola pemerintahan menurut Gambir Bhatta (1996:7). Lalu untuk menganalisis dan mendeskripsikan apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) yang dihadapi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan di

bidang transportasi publik untuk mengatasi kemacetan dalam hal ini pengelolaan pada Trans Metro Bandung yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2020, serta untuk menganalisis dan mendeskripsikan upaya alternatif yang dilakukan terhadap analisis SWOT tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif merupakan metode yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memvalidasi terkait fenomena sosial yang diteliti. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasikan data. Sedangkan pendekatan kualitatif adalah metode yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, serta dokumentasi. Informasi dan data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari narasumber yang ditentukan berdasarkan teknik purposive sampling. Data dan informasi yang sudah didapat, lalu diolah dan dianalisis oleh peneliti dengan langkah-langkah analisis data menurut Model Miles and Hubberman dalam Sugiyono (2016:246) yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## **HASIL PEMBAHASAN**

Penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Kota Bandung yang mempunyai tugas dan fungsi

menyelenggarakan dan mengatur segala urusan di bidang perhubungan, salah satunya adalah pelayanan publik di bidang transportasi. Penyediaan transportasi publik ini menjadi kerja nyata dari Pemerintah Kota Bandung untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat di bidang transportasi, sehingga dengan adanya sarana transportasi publik ini masyarakat dapat mengakses seluruh daerah yang ingin mereka tuju di Kota Bandung. Penyediaan transportasi publik pun menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan besar di Kota Bandung yaitu kemacetan lalu lintas.

Terdapat beberapa program kegiatan dan kebijakan yang dijalankan oleh Dishub Kota Bandung untuk mengatasi kemacetan di Kota Bandung diantaranya penempatan personil di titik rawan kemacetan, edukasi masyarakat, penertiban parkir liar, pengaturan sistem lalu lintas, pengaturan kendaraan pribadi, dan penyediaan transportasi publik.

Trans Metro Bandung merupakan salah satu transportasi publik yang beroperasi di Kota Bandung. Disediaknya Trans Metro Bandung sebagai transportasi publik ini diharapkan dapat mendorong masyarakat Kota Bandung yang menggunakan transportasi pribadi dapat beralih menggunakan transportasi publik sebagai penunjang mobilitas sehari-hari sehingga mampu mengatasi kemacetan lalu lintas di Kota Bandung. Pengaruh penyediaan Trans Metro Bandung sebagai transportasi publik tersebut sangat besar apabila sudah terealisasi dan teralihisasi secara baik dan teratur.

Kebijakan terkait transportasi publik dalam penjelasan Peraturan Daerah Kota

Bandung Nomor 16 Tahun 2012 ini secara langsung dilimpahkan oleh Pemerintah Kota Bandung kepada Dinas Perhubungan sebagai pembuat regulasi sekaligus operator di lapangan dalam pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam hal ini pula Dinas Perhubungan Kota Bandung melaksanakan pengelolaan Trans Metro Bandung sebagai salah satu transportasi publik di Kota Bandung.

Dishub Kota Bandung menyediakan Trans Metro Bandung sebagai salah satu pengembangan dari transportasi publik berbasis *Bus Rapid Transit* (BRT) dimana sarana dan prasarananya lebih nyaman dibandingkan angkutan umum biasa. Namun, sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk menaiki transportasi publik dalam hal ini adalah Trans Metro Bandung sehingga kemacetan di Kota Bandung masih kerap terjadi. Adapun tahapan pengelolaan Trans Metro Bandung sebagai transportasi publik dimulai dari perencanaan yang mengikuti kebijakan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat, lalu mengorganisasikan bidang-bidang yang akan bertanggung jawab terhadap berjalannya bus Trans Metro Bandung. Setelah itu mereka berkoordinasi dan menggerakkan program dan kegiatan TMB yang akan berlangsung. Dari penggerakan tersebut nantinya diadakan pengawasan dan evaluasi.

Pengelolaan Trans Metro Bandung sebagai transportasi publik yang disediakan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kemacetan terdiri atas kegiatan mengatur dan mengurus. Pengelolaan Trans Metro Bandung secara penuh dilakukan oleh Unit Pelaksana

Teknis Angkutan Dishub Kota Bandung, dimana unit ini berperan sebagai regulator dalam mengatur perencanaan, perizinan, pembiayaan, pembinaan, serta pengawasan selama bus Trans Metro Bandung beroperasi. Adapun tahapan operasional pengelolaan Trans Metro Bandung dimulai dari perencanaan strategis, perencanaan operasional, pengorganisasian sumber daya manusia, penggerakan, pengawasan, dan evaluasi.

Memasuki tahun 2020 terjadi pandemic Covid-19 yang berdampak pada penyelenggaraan transportasi publik, salah satunya pada pengelolaan Trans Metro Bandung. Pengelolaan Trans Metro Bandung pada tahun 2020 lebih memperhatikan protokol kesehatan dan melakukan strelisasi agar tidak terjadi penyebaran virus ketika berada di dalam bus Trans Metro Bandung.

Pandemi Covid-19 ini memiliki dampak yang cukup besar pada pengelolaan Trans Metro Bandung khususnya dalam segi operasional. Dishub Kota Bandung membatasi operasional bus sehingga terjadi penurunan jumlah penumpang yang sangat signifikan sampai 79% dan pendapatan Trans Metro Bandung pada tahun 2020 sangat jauh menurun dan tidak mencapai target yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Operasional dari Trans Metro Bandung mulai berjalan normal dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan setelah Pemkot Kota Bandung mencabut kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

Di masa pandemic Covid-19 ini pun kecenderungan pemakaian kendaraan pribadi semakin meningkat sehingga lalu

lintas di Kota Bandung masih sering dilanda kemacetan. Terjadi peningkatan pengguna kendaraan pribadi sebanyak 82% dan penurunan penumpang transportasi publik khususnya Trans Metro Bandung sebanyak 79% yang diungkapkan oleh Kepala UPT Angkutan Dishub Kota Bandung. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020, kebanyakan masyarakat beralih menggunakan kendaraan pribadi karena rasa takut akan virus Covid-19.

Dari berbagai program, kegiatan, dan kebijakan yang dilakukan terkait pengatasan kemacetan melalui penyediaan transportasi publik, dalam hal ini pengelolaan pada Trans Metro Bandung pada tahun 2020, Dishub Kota Bandung perlu menerapkan empat prinsip *good governance* diantaranya prinsip akuntabilitas, keterbukaan, transparansi, dan kerangka hukum.

## 1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban setiap unit organisasi untuk melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan, pengelolaan, dan pengendalian sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan dalam rangka mencapai misi atau tujuan yang telah ditetapkan. Bentuk pertanggungjawaban oleh aparatur pemerintah adalah dengan menjaga keberlangsungan tugas dari program kegiatan dengan baik serta melaksanakan pengelolaan program kegiatan secara professional oleh berbagai bidang yang terkait dalam program kegiatan tersebut.

Bentuk dari pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat dengan melaporkan setiap program kegiatan serta target yang dicapai dalam pengelolaan Trans Metro Bandung, termasuk pada tahun

2020 target dalam pendapatan Trans Metro Bandung sangat menurun dan target jumlah penumpang pun menurun sampai 79%.

Namun melihat pada pernyataan masyarakat, pertanggungjawaban Dishub Kota Bandung masih terbatas pada laporan administratif saja kepada pemerintah pusat karena mereka merasa pelaksanaan pengelolaan Trans Metro Bandung untuk mengatasi kemacetan belum terealisasi dengan baik. Selain itu, bentuk pertanggungjawaban kepada penumpang Trans Metro Bandung berupa pemberian tarif yang murah dan penerapan protokol kesehatan yang ketat baik kru maupun penumpang Trans Metro Bandung di masa pandemic Covid-19.

## 2. Transparansi

Prinsip transparansi merupakan prinsip yang mengarah pada kejelasan mekanisme implementasi program dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat. Trans Metro Bandung merupakan salah satu implementasi program dan kebijakan dari Pemerintah Kota Bandung untuk memperbaiki sistem angkutan umum dan mengatasi kemacetan di Kota Bandung.

Proses perumusan kebijakan penyediaan dan penataan transportasi publik dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan mengeluarkan berbagai peraturan terkait penyelenggaraan Angkutan Massal diantaranya : Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2005-2025, Keputusan Walikota Bandung Nomor

551.2/Kep.646-Huk/2006 tentang Pengoperasian Trans Metro Bandung di Koridor Cibeureum-Cibiru, Keputusan Walikota Bandung Nomor 551.2/Kep.649-Dishub-2008 tentang Tarif Angkutan Umum Massal Bus Trans Metro Bandung, dan Keputusan Walikota Bandung Nomor 704 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum Pengoperasian Trans Metro Bandung.

Kebijakan publik yang sudah dirumuskan tersebut meliputi segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kepala Manajemen Transportasi Dishub Kota Bandung menyatakan bahwa kebijakan penyediaan transportasi publik terutama Trans Metro Bandung yang dikelola oleh Dishub Bandung ini belum berjalan dengan efektif karena Trans Metro Bandung tidak memiliki jalur khusus.

Terkait dengan kejelasan kegiatan penyediaan transportasi publik terutama Trans Metro Bandung pun dinilai belum sesuai dengan tujuannya untuk mengatasi permasalahan kemacetan di Kota Bandung karena masyarakat masih menganggap bahwa terkadang Trans Metro Bandung ini menjadi salah satu penyebab kemacetan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan salah satu tujuan disediakannya Trans Metro Bandung yaitu untuk mengatasi kemacetan. Hal tersebut pun membuat ketidakjelasan antara tujuan dan realita yang terjadi di lapangan terkait penyediaan transportasi publik untuk mengatasi kemacetan.

### 3. Keterbukaan

Keterbukaan merupakan prinsip yang melibatkan masyarakat, dimana masyarakat memiliki peranan penting untuk memberikan tanggapan dan kritiknya terhadap program dan kebijakan yang telah

dilakukan oleh pemerintah. Gambir Bhatta (1996:7) menyebutkan tujuan dari adanya keterbukaan adalah untuk menciptakan rasa percaya dari masyarakat terhadap pemerintah dengan menyediakan ruang informasi yang mudah diakses sehingga nantinya dapat tercipta timbal-balik dari program kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dapat mengevaluasi kinerja pemerintah terhadap program kegiatan yang dilakukan tersebut.

Kualitas pelayanan kepada masyarakat berpengaruh dalam keberhasilan pengelolaan Trans Metro Bandung. Di dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 704 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Massal Trans Metro Bandung terdapat jenis dan mutu pelayanan yang berhak diterima oleh pengguna jasa angkutan meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan. Pelayanan dari Trans Metro Bandung sudah cukup baik walaupun belum maksimal karena terdapat beberapa keluhan yang cukup mengganggu penumpang terutama dalam aspek keteraturan, seperti keterlambatan waktu keberangkatan bus lebih dari 30 menit dan mengangkut penumpang sembarangan di pinggir jalan sehingga menimbulkan kemacetan, dimana seharusnya halte Trans Metro Bandung dapat digunakan dengan lebih baik.

Menyikapi keluhan-keluhan penumpang terkait pelayanan Trans Metro Bandung, Dishub Kota Bandung menyediakan ruang untuk penumpang dalam menyampaikan keluhannya, dimana dari keluhan tersebut Dishub Kota Bandung akan melakukan evaluasi agar menjadi lebih baik. Dishub Kota Bandung memiliki

keterbukaan yang besar kepada masyarakat khususnya penumpang Trans Metro Bandung terkait pelayanan yang diberikan kepada mereka. Keluhan yang penumpang rasakan pun dapat disampaikan ke media sosial Dishub Kota Bandung yaitu facebook (@dishubkotabandung), twitter (@dishub\_kotabdg), serta instagram (@dishubkotabandung), atau keluhan dapat disampaikan langsung ke akun resmi Unit Pelaksana Teknis Angkutan Dishub Kota Bandung yaitu instagram (@uptangkutankotabandung).

Lebih lanjut lagi, Bapak Inggit menjelaskan bahwa setiap harinya selalu ada keluhan tentang Trans Metro Bandung karena memang pasti akan selalu ada hambatan tak terduga dalam mekanisme operasional berkendara. Beliau pun mengatakan bahwa UPT Angkutan Dishub Kota Bandung ini lebih suka jika masyarakat atau penumpang dapat menyampaikan kritiknya secara langsung sehingga menjadi evaluasi bagi pihak Dishub untuk mengetahui dimana letak kesalahan yang harus diperbaiki dan bisa memberikan pelayanan transportasi yang lebih baik untuk kedepannya. Menurut observasi peneliti pun sosial media yang telah disediakan cukup dikelola dengan baik dan aktif karena setiap minggunya selalu update program kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Dishub Kota Bandung sehingga kemungkinan besar aduan dan keluhan yang disampaikan oleh penumpang dapat dibaca dan tersampaikan pula dengan baik.

#### 4. Kerangka Hukum

Prinsip ini berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan dan program

yang dilaksanakan oleh pemerintah, dimana kerangka hukum itu harus ditegakkan secara adil dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam hal prinsip kerangka hukum, peneliti menganalisa jaminan dan rasa adil yang didapatkan oleh penumpang Trans Metro Bandung.

Salah satu jaminan yang didapatkan oleh penumpang adalah jaminan keselamatan dan kenyamanan dalam berkendara. Hal ini dikarenakan Dishub Kota Bandung selalu melakukan pengendalian sumber daya manusia berupa evaluasi kru yang bertugas dalam pengelolaan Trans Metro Bandung setiap harinya. Setiap bulannya juga terdapat evaluasi dan penyaringan kru yang bagus dan kru yang bermasalah, dimana kru yang bermasalah ringan ini akan mendapatkan teguran dan bermasalah berat mendapatkan SP (Surat Peringatan) Tingkat 1-3. Peneliti melihat bahwa hal tersebut dapat menjadi salah satu jaminan bagi penumpang yaitu jaminan keselamatan dan kenyamanan karena Dishub Kota Bandung senantiasa menggunakan sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu, dalam hal keadilan dapat dilihat pada kesetaraan tarif yang dipungut kepada masyarakat yaitu dibawah lima ribu rupiah.

#### **KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG, DAN ANCAMAN (ANALISIS SWOT)**

Tata kelola pemerintah yang terlaksana dengan baik tidak terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat diantaranya kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Berikut adalah pemaparan SWOT oleh peneliti secara sederhana :

#### **Kekuatan (*Strength*)**

1. Fasilitas transportasi dari Trans Metro Bandung yang sudah menunjang
2. Berbasis BRT (Bus Rapid Transit) yang lebih modern
3. Kualitas sumber daya manusia terutama pengemudi bus Trans Metro Bandung
4. Bus Trans Metro Bandung memiliki kapasitas yang besar
5. Tarif bus yang terjangkau

#### **Kelemahan (*Weakness*)**

1. Jumlah armada Trans Metro Bandung yang kurang memadai
2. Halte sebagai salah satu fasilitas Trans Metro Bandung yang kurang terawat
3. Trans Metro Bandung tidak memiliki jalur khusus
4. Mengangkut dan menaikkan penumpang diluar halte
5. Belum semua daerah dilintasi oleh Trans Metro Bandung

#### **Peluang (*Opportunities*)**

1. Mengurangi kemacetan
2. Perkembangan teknologi di masa yang akan datang
3. Penambahan jumlah armada dan koridor Trans Metro Bandung

#### **Ancaman (*Threats*)**

1. Kurangnya anggaran dari pemerintah
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan transportasi publik
3. Adanya transportasi berbasis online
4. Rasa takut masyarakat menaiki transportasi publik di masa pandemic Covid-19.

#### **Upaya Alternatif Terhadap Hasil Identifikasi SWOT pada Tata Kelola Pemerintahan Dalam Mengatasi**

#### **Kemacetan Melalui Penyediaan Transportasi Publik (Studi Pada Pengelolaan Trans Metro Bandung Oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2020)**

Berdasarkan hasil penelitian melalui studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi, penulis merumuskan upaya alternatif dengan strategi hasil analisis SWOT menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan pada tata kelola pemerintahan dalam mengatasi kemacetan melalui penyediaan transportasi publik, dalam hal ini studi pada pengelolaan Trans Metro Bandung oleh Dishub Kota Bandung tahun 2020, diantaranya :

1. Penyediaan Call Center Trans Metro Bandung;
2. Meningkatkan aksesibilitas bus Trans Metro Bandung di seluruh kota Bandung;
3. Pembatasan lalu lintas bagi pengguna kendaraan pribadi;
4. Peningkatan kapasitas jaringan jalan;
5. Sosialisasi pentingnya penggunaan transportasi publik kepada masyarakat;
6. Sterilisasi rutin armada bus Trans Metro Bandung;
7. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan transportasi publik.

#### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian melalui studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi serta analisis yang sudah dilakukan mengenai pengatasan kemacetan melalui penyediaan transportasi publik, dalam hal ini pengelolaan Trans Metro Bandung oleh Dishub Kota Bandung tahun

2020, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Trans Metro Bandung sebagai transportasi publik yang disediakan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kemacetan terdiri atas kegiatan mengatur dan mengurus. Kegiatan mengatur ini mencakup pembuatan kebijakan, sedangkan kegiatan mengurus mencakup pelaksanaan dari kebijakan tersebut. Pada tahun 2009, Pemerintah Kota Bandung menyediakan Trans Metro Bandung yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung bertujuan untuk memperbaiki sistem angkutan massal dan menjadi salah satu upaya untuk mengatasi kemacetan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut sudah dilaksanakan tetapi belum sepenuhnya berhasil secara signifikan untuk mengatasi permasalahan kemacetan. Melihat konsep tata kelola pemerintahan, Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini Dishub Kota Bandung belum sepenuhnya optimal dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dalam bidang transportasi karena belum memenuhi semua aspek tata kelola pemerintahan. Terdapat empat aspek tata kelola pemerintahan yang dapat dinilai yaitu : 1) Akuntabilitas, 2) Transparansi, 3) Keterbukaan, dan 4) Kerangka Hukum. Dilihat dari aspek akuntabilitas, dijelaskan terkait pelaksanaan pengelolaan Trans Metro Bandung dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Dishub Kota Bandung berupa pelaporan kepada pusat dan pemberian tarif murah kepada masyarakat. Pada

aspek transparansi, Dishub Kota Bandung belum memenuhi aspek ini secara maksimal karena masih adanya ketidakjelasan antara tujuan dan realitas yang terjadi di lapangan terkait penyediaan transportasi publik sebagai salah satu upaya mengatasi kemacetan. Masyarakat masih menganggap bahwa terkadang Trans Metro Bandung ini menjadi salah satu penyebab kemacetan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan salah satu tujuan disediakannya Trans Metro Bandung yaitu untuk mengatasi kemacetan. Selanjutnya pada aspek keterbukaan, Dishub Kota Bandung menerapkan prinsip keterbukaan dengan cukup baik kepada masyarakat dengan menyediakan berbagai informasi di sosial media. Hal tersebut dapat menjadi ruang bagi masyarakat khususnya penumpang Trans Metro Bandung untuk menyampaikan aduan dan keluhannya. Pada aspek kerangka hukum, Dishub Kota Bandung senantiasa melakukan evaluasi dan penyaringan kru yang bagus dan kru yang bermasalah. Setiap kru yang bermasalah akan dikenakan sanksi dan hukum yang telah ditentukan. Selain itu, dalam hal keadilan dapat dilihat pada kesetaraan tarif yang dipungut kepada masyarakat yaitu dibawah lima ribu rupiah.

2. Berdasarkan hasil analisis SWOT yang telah dilakukan, terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan dalam mengatasi kemacetan melalui penyediaan transportasi publik, dalam hal ini pengelolaan Trans Metro Bandung,

Dishub Kota Bandung dapat memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada untuk mengatasi dan meminimalisir kelemahan serta ancaman yang ada sehingga dapat memaksimalkan upaya mengatasi kemacetan melalui penyediaan transportasi publik, dalam hal ini pengelolaan Trans Metro Bandung.

3. Upaya alternatif yang telah peneliti jabarkan dapat menjadi rekomendasi dan pertimbangan bagi Dishub Kota Bandung dalam mengambil keputusan terkait upaya mengatasi kemacetan melalui penyediaan transportasi publik, dalam hal ini pengelolaan Trans Metro Bandung.

## REFERENSI

- Sutopo, H.B. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta
- Sedarmayanti. 2004. Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance. Bandung : Mandar Maju.
- Sedarmayanti. 2012. Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Edisi Revisi. Bandung : Mandar Maju.
- Anas Tahir. 2005. Angkutan Massal Sebagai Alternatif Mengatasi Persoalan Kemacetan Lalu Lintas Kota Surabaya. 3(3). 169-182.
- Listifadah & Reni Puspitasari. 2015. Evaluasi Kinerja Trans Metro Bandung. 17 (2). 65-78.
- Nia Gusti Lestari. 2017. Pengelolaan Sistem Transportasi Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2013-2015. 4(1). 1-14.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan

## ACKNOWLEDGMENT

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak Dinas Perhubungan Kota Bandung beserta informan yang terlibat dalam penelitian ini karena telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melakukan penelitian serta kooperatif dalam memberikan data dan informasi